

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Vikry Candra Yudhatama

NPP. 31.0642

Asdaf Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselematan Publik

Email: vikry121@gmail.com

Dosen Pembimbing: Nadya Anggara Putri S.E, M.M

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of forest and land fires in Palangka Raya City and the need for collaboration to prevent forest and land fires in order to reduce the number of fires that occur. **Purpose:** The aim of this research is to determine collaborative governance in preventing forest and land fires in Palangka Raya City. **Method:** This research uses exploratory qualitative methods and analysis of collaborative governance according to Ansell and Gash's theory. Data collection techniques were carried out using in-depth interviews (8 informants), observation and documentation. **Result:** The findings obtained by the author in this research are that collaborative governance in preventing forest and land fires in initial conditions is classified as good, institutional design is classified as not good, facilitative leadership is classified as good, and the collaboration process is classified as sufficient because there are still obstacles to collaboration between the government and community, public and private. **Conclusion:** The collaboration carried out has not gone well and optimally because no meetings have been held. New meetings are held when hotspots emerge or the mayor of Palangka Raya has determined the status of forest and land fires.

Keywords: collaborative governance, prevention, forest and land fires

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangka Raya serta perlunya kolaborasi untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar dapat mengurangi jumlah kebakaran yang terjadi. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *collaborative governance* dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangka Raya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif dan analisis terhadap *collaborative governance* menurut Teori Ansell dan Gash. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (8 informan), observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu *collaborative governance* dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada kondisi awal tergolong baik, desain kelembagaan tergolong tidak baik, kepemimpinan fasilitatif tergolong baik, dan proses kolaborasi tergolong cukup karena masih terdapat terkendala dengan baru dilakukan kolaborasi antara pemerintah, komunitas masyarakat dan swasta. **Kesimpulan:** kolaborasi yang dilakukan belum berjalan dengan baik dan maksimal karena belum adanya pertemuan yang dilakukan. Pertemuan baru dilakukan ketika munculnya titik api atau walikota Palangka Raya telah menetapkan status pada kebakaran hutan dan lahan.

Kata kunci: collaborative governance, pencegahan, kebakaran hutan dan lahan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena perubahan iklim di Indonesia yang tidak dapat diprediksi pada bulan September 2022 Indonesia mengalami musim kemarau yang disertai dengan tingginya intensitas hujan yang disebut kemarau basah dan pada bulan Mei 2023 Indonesia mengalami kenaikan suhu panas yang mengakibatkan terjadinya musim kemarau panjang (Susetyo, 2023). Faktor utama terjadinya musim kemarau panjang diakibatkan karena adanya El nino yang biasa terjadi dalam kurun waktu 2 sampai 7 tahun dan bertahan 12 hingga 15 bulan sehingga dapat memicu terjadinya kekeringan (Safitri, 2015).

Lamanya musim kemarau di Indonesia akan meningkatkan titik panas (hotspot) yang berdampak pada tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia (Finaka, 2018). Di Indonesia terdapat 6.524 hotspot yang terbagi menjadi 442 tingkat kepercayaan rendah, 5.870 tingkat kepercayaan sedang dan 212 tingkat kepercayaan tinggi (Javier, 2023).

Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai jumlah hotspot terbanyak di Indonesia dengan Tingkat kepercayaan tinggi sebanyak 127 hotspot (Javier, 2023). Banyaknya jumlah hotspot di Provinsi Kalimantan Tengah menyebabkan tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan. Pada bulan Januari hingga September 2023 tercatat 69.046,60 hektare hutan dan lahan yang telah terbakar (Direktorat PKHL, 2023).

Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 1 kota dan 13 kabupaten dengan rata-rata memiliki potensi tinggi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. yang salah satu daerahnya adalah Kota Palangka Raya (BNPB, 2022). Pada tahun 2023 jumlah hutan dan lahan yang terbakar mengalami kenaikan tinggi yang awalnya 0 hektare menjadi 1.759,67 hektare sehingga perlu adanya kolaborasi di beberapa tahapan penanggulangan bencana salah satunya adalah pencegahan.

Kolaborasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, Organisasi kemasyarakatan seperti Masyarakat Peduli Api (MPA), Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) dan Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK) serta pihak swasta yaitu PT. Palimindo Gemilang Kencana (PGK) dengan melakukan pemadaman api di beberapa titik (Wibowo, 2023). Akademisi juga berupaya melakukan edukasi dan pengetahuan yang dimiliki mengenai pencegahan kepada masyarakat dan Kemudian media massa melakukan penyebarluasan informasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Kolaborasi diharapkan mampu mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan kolaborasi dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangka Raya. Faktor utama Tingginya jumlah lahan yang terbakar di Kota Palangka Raya yang awalnya pada tahun 2022 sejumlah 0 hektare hingga tahun 2023 menjadi 1.759,67 hektare sehingga perlunya kolaborasi di beberapa tahapan penanggulangan bencana salah satunya adalah pencegahan. Pencegahan bukan hanya tentang sosialisasi kepada masyarakat namun lebih ditunjukkan kepada bagaimana cara supaya api tidak dinyalakan atau api kecil dipadamkan sebelum meluasnya sebaran api sehingga sulit di padamkan. (Maylani & Mashur, 2019).

Pemerintah Kota Palangka Raya tidak dapat melakukan upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan secara sendiri namun memerlukan kerja sama antar seluruh sektor yang saling berhubungan menggunakan kolaborasi pentahelix bencana. Kolaborasi yang tidak dilakukan

oleh pemerintah, swasta, komunitas masyarakat, akademisi, dan media massa akan mempengaruhi jumlah kejadian dan luas kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangka Raya.

Kolaborasi yang dilakukan dapat menutupi kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh BPBD Kota Palangka Raya yang hanya mempunyai 48 pegawai. Jarak kantor BPBD yang jauh dari beberapa wilayah sehingga dapat menyebabkan lambatnya penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kekurangan tersebutlah harus diatasi oleh pemerintah dengan adanya peran kelima unsur sehingga masalah kebakaran hutan dan lahan di wilayah Palangka Raya dapat terselesaikan secara efisien dan efektif.

Kolaborasi yang belum dilakukan sepenuhnya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangka Raya harus diperhatikan penerapannya semenjak dibentuknya BPBD Kota Palangka Raya pada tahun 2017. Kolaborasi yang belum berjalan optimal ini akan mempengaruhi luas daerah yang terbakar sehingga perlu kerjasamanya dengan berbagai sektor agar kebakaran hutan dan lahan dapat diatasi.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks collaborative governance maupun kebakaran hutan dan lahan. Penelitian Hashfi Rafdi, Sadu Wasistiono dan Meltarini berjudul Collaborative Governance Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau menemukan bahwa partisipasi pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi kunci bagi pemerintah dalam mewujudkan kolaborasi yang efektif untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Tingkat kesadaran masyarakat perlu diperkuat dan ditingkatkan sinergitas bagi para pemangku kepentingan (Rafdi et al., 2023). Penelitian Bela Safira menemukan bahwa collaborative governance yang dilakukan belum maksimal masih mengalami kendala pada membuat kesepakatan awal dan membangun kelembagaan selain itu, kurangnya anggaran dan penengakan hukum yang belum massif (Safira et al., 2023). Penelitian Marta Delima menemukan bahwa kerjasama pemerintah yang kolaboratif belum optimal masih terbatas pada proses koordinasi oleh instansi terkait. Masalah dan kendala dalam pelaksanaan mungkin menghambat beberapa tahapan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati (Lumbanbatu et al., 2021). Penelitian Hendra Irawan menemukan bahwa kerjasama pemerintah yang kolaboratif dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Kepulauan Sula belum mencapai potensi maksimal karena kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan lain, seperti akademisi, serta kendala terkait anggaran dan peralatan yang memadai (Umabaihi et al., 2022). Penelitian Sindi Puspita menemukan bahwa *collaborative governance* yang dilakukan di Kabupaten Bojonegoro belum terlihat sepenuhnya oleh beberapa pemangku kepentingan seperti akademisi dan pihak swasta (Puspita et al., 2024).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni collaborative governance dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangka Raya berbeda tempat lokasi penelitian dengan kelima penelitian terdahulu dan. Teori yang digunakan penulis yaitu teori Ansell dan Gash berbeda dengan penelitian Marta Delima dan Bela Safira. Kolaborasi yang dibahas oleh penulis merupakan kolaborasi pada tahap pencegahan yang berbeda dengan penelitian Bela Safira, Marta Delima, Sindi Puspita dan Hendra Irawan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan collaborative governance dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksploratif yaitu menemukan penyebab dari sesuatu yang sedang terjadi dan menggali menggali pengetahuan baru (Semiawan, 2010).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data melalui wawancara, penulis melakukan wawancara mendalam terhadap 8 orang informan yang mewakili unsur pentahelix terdiri dari Kepala BPBD Kota Palangka Raya (pemerintah), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangka Raya, Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK), Barisan Pemadam Kebakaran (BPK), Dosen Jurusan Kehutanan, PT. Palmindo Gemilang Kencana, Tabangen, dan Kalteng Pos. Adapun analisisnya menggunakan teori collaborative governance yang digagas oleh Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008) yang menyatakan bahwa collaborative governance terdiri dari starting condition (kondisi awal), institutional design (desain kelembagaan), facilitative leadership (kepemimpinan fasilitatif) dan collaborative process (proses kolaborasi).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis collaborative governance dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangka Raya menggunakan teori dari Ansell dan Gash yang terdiri dari starting condition (kondisi awal), institutional design (desain kelembagaan), facilitative leadership (kepemimpinan fasilitatif) dan collaborative process (proses kolaborasi).

3.1 Starting Condition (Kondisi Awal)

Penulis melakukan penelitian terdapat ketidakseimbangan sumber daya pada BPBD dimana baru melakukan kerjasama dengan swasta dan komunitas masyarakat untuk menutupi kekurangan anggaran dan pegawai sehingga dapat berjalannya upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, media massa juga turut membantu pemerintah berupa penyebar pengetahuan kebakaran kepada masyarakat namun belum melakukan kerjasama. Kemudian BPBD belum melakukan kerjasama dengan pihak akademisi yang dapat membantu pemerintah dalam pengetahuan tentang kebakaran hutan dan lahan.

Adanya insentif untuk berpartisipasi terdapat pada seluruh unsur yaitu pihak swasta yang dapat menjaga nama baik mereka ketika ikutserta dalam pencegah, komunitas masyarakat bisa mendapatkan uang, media massa dapat meningkatkan penghasilan ketika memberikan berita yang mengedukasi tentang pencegahan dan akademisi dapat melakukan penelitian. menyimpulkan bahwa setiap pemangku kepentingan mengalami tingginya ketakutan terjadi konflik berupa masyarakat yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar lahan atau hutan sebagai pemicu awal terjadinya kebakaran. Kelima pemangku kepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan kolaborasi karena mempunyai permasalahan yang sama sehingga perlu adanya penyelesaian secara bersama.

3.2 Institutional Design (Desain Kelembagaan)

Partisipasi pihak swasta telah berpartisipasi dalam pencegahan kebakaran dengan adanya sumur bor dan kanal yang terbentuk di sekitar perusahaan. Kemudian komunitas masyarakat juga berpartisipasi secara aktif di setiap kegiatan pencegahan baik secara mandiri maupun ikutserta dengan BPBD. Selanjutnya media massa juga berpartisipasi dapat dilihat dari koran-koran yang telah diterbitkan masing-masing media dimana di dalamnya terdapat ajakan

tentang larangan membakar lahan bahkan informasi terbaru berkaitan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dapat dilihat oleh seluruh masyarakat Kota Palangka Raya.

Belum ada peraturan mengatur tentang kolaborasi antar pemangku kepentingan terutama dalam konteks pentahelix sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat terlibat sepenuhnya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pada dasarnya pencegahan bencana bukan hanya tanggungjawab pemerintah atau kalangan tertentu saja namun masalah bencana tanggungjawab bersama sehingga seluruh aktor berhak berpartisipasi di dalamnya.

Pemerintah belum transparan kepada para pemangku kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi komitmen terhadap proses kolaborasi para pemangku kepentingan. Transparan dimaksud pada pembahasan ini berupa anggaran dan program yang akan dilakukan pemerintah untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Apabila transparansi dilakukan dapat meningkatkan kepercayaan sehingga akan menimbulkan peningkatan keberhasilan kolaborasi.

3.3 Facilitative Leadership (Kepemimpinan Fasilitatif)

Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan penting untuk melakukan koordinasi yang cepat dan memberikan perintah yang jelas. Untuk memperkuat kerjasama dengan para pemangku kepentingan diperlukan gaya kepemimpinan yang memfasilitasi kolaborasi. Oleh karena itu, Kepala BPBD memiliki tanggung jawab untuk secara konsisten mendampingi upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta aktif berdiskusi dengan kelima pemangku kepentingan untuk saling berbagi pemahaman dan memberikan arahan terkait penanganan bencana yang terjadi di Kota Palangka Raya.

Pemerintah telah melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat pada kelurahan di Kota Palangka Raya dengan terbentuknya Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA). KATANA yang terbentuk berguna dalam membantu pemerintah dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di sekitar lingkungan kelurahan sehingga masyarakat kelurahan tersebut dapat melakukan pencegahan secepat mungkin sebelum menunggu BPBD datang ke lokasi. Selain itu, Pemerintah telah melakukan pelatihan kepada komunitas masyarakat seperti BPK dan TSAK sehingga mempunyai wewenang untuk melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangka Raya. Kemudian pihak swasta juga dilakukan pelatihan tentang penanggulangan bencana kebakaran kepada tim pemadam pada setiap perusahaan sehingga swasta dapat melakukan pencegahan kebakaran secara mandiri di lingkungan sekitar perusahaannya.

3.4 Collaborative Process (Proses Kolaborasi)

Penulis melakukan penelitian sehingga mendapatkan bahwa pemerintah belum melakukan pertemuan rutin yang dilakukan dengan pihak-pihak yang dapat berperan aktif dalam memberikan ide ataupun gagasan seperti komunitas masyarakat, swasta, akademisi dan media massa. Selain itu, lambatnya pertemuan yang dibuat oleh pemerintah dapat menjadi salah satu penyebab tingginya kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangka Raya. Pertemuan harus dilakukan untuk membahas segala hal terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan sehingga pencegahan dapat dilaksanakan segera secara terencana.

Membangun kepercayaan dilakukan oleh pemangku kepentingan diantara pemerintah, komunitas masyarakat, dan swasta di Kota Palangka Raya dengan membangun sinergitas terhadap tindakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sinergitas ini muncul ketika adanya kerjasama antara pemangku kepentingan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Terciptanya sinergitas tercapai melalui upaya mengikutsertakan para pemangku kepentingan dalam kegiatan sosialisasi maupun program tentang pencegahan.

Komitmen telah terbentuk kepada komunitas masyarakat dan swasta karena pemerintah berhasil membangun kepercayaan untuk dalam proses kolaborasi. Namun proses kolaborasi

pentahelix tidak dapat dilakukan karena tidak adanya komitmen akademisi dan media massa karena terdapat rasa kurang percaya terhadap pemerintah karena kurangnya keterbukaan atau transparansi. Oleh karena itu, Pemerintah harus berperan aktif dalam membangun komitmen dengan para pemangku kepentingan tersebut karena pada dasarnya komitmen sangat dibutuhkan dalam kolaborasi sehingga meminimalisir penolakan yang terjadi dari para pemangku kepentingan.

Adanya pemahaman berupa kesadaran untuk membantu kekurangan tersebut telah dilakukan oleh swasta dan komunitas masyarakat. Hal tersebut disebutkan oleh pihak swasta yang telah membantu membangun sumur bor sebagai bentuk upaya mengatasi permasalahan kurangnya air. Selain itu pihak swasta memberikan bantuan peralatan dan personil untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Komunitas masyarakat yang tersebar diseluruh kelurahan di Kota Palangka Raya dapat membantu pemerintah untuk cepat menangani kebakaran pada daerah yang jauh dari kantor BPBD. Kemudian masyarakat juga membantu personil dan peralatan kepada pemerintah untuk menangani bencana kebakaran.

Pemerintah baru melaksanakan kolaborasi dengan dua unsur pemangku kepentingan yaitu swasta dan komunitas masyarakat. Selain itu, pemerintah belum terlihat melakukan kolaborasi dengan pihak akademisi dan media massa untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kolaborasi yang telah berjalan pada komunitas masyarakat dan swasta pemangku kepentingan baru sebatas dialog tatap muka yang terjadi tidak dilakukan pada waktu dan tempat yang sama. Para pemangku kepentingan melaksanakan proses kolaborasi sesuai dengan tupoksi mereka masing masing sehingga proses kolaborasi hanya bersifat urusan kelembagaan bukan dalam bentuk suatu proses kegiatan atau program bersama.

3.5 Diskusi Temuan Utama

Collaborative governance dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangka Raya mendapatkan banyak temuan menarik yang mempunyai beberapa kesamaan dengan penelitian terdahulu. Penulis menemukan temuan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kota Palangka Raya akibat dari ulah masyarakat itu sendiri karena ingin membuka lahan untuk perkebunan dengan cepat karena dinilai lebih ekonomis dan cepat. Hal tersebut dapat menjadi cerminan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat tentang perintah atau larangan membakar lahan yang telah di sosialisasikan. Sama halnya dengan temuan Hashfi Rafdi bahwa tingkat kesadaran masyarakat perlu diperkuat dan ditingkatkan sinergitas bagi para pemangku kepentingan (Rafdi et al., 2023).

Kolaborasi yang dilakukan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan mempunyai kekurangan dalam hal anggaran dan dasar aturan yang belum jelas yang merupakan bagian dari kelembagaan sehingga menyulitkan para pemangku kepentingan untuk ikut serta didalamnya. Sama halnya dengan temuan Bela Safira bahwa collaborative governance yang dilakukan belum maksimal masih mengalami kendala pada membuat kesepakatan awal dan membangun kelembagaan selain itu, kurangnya anggaran dan penengakan hukum yang belum massif (Safira et al., 2023). Kolaborasi yang dilakukan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan juga baru sebatas dialog tatap muka baru sebatas dialog tatap muka yang terjadi tidak dilakukan pada waktu dan tempat yang sama atau hanya berkoordinasi sehingga kolaborasi hanya bersifat urusan kelembagaan bukan dalam bentuk suatu proses kegiatan atau program bersama. Sama halnya dengan temuan Marta Delima bahwa kerjasama pemerintah yang kolaboratif belum optimal masih terbatas pada proses koordinasi oleh instansi terkait. Masalah dan kendala dalam pelaksanaan mungkin menghambat beberapa tahapan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati (Lumbanbatu et al., 2021).

Kolaborasi yang dilakukan belum dapat dikatakan maksimal atau telah berjalan sepenuhnya karena kurangnya keikutsertaan unsur akademisi sebagai unsur yang memberikan temuan-temuan terbaru sehingga dapat berguna dapat pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Hal ini

dapat dilihat dari pemerintah yang belum ada mengikutsertakan pihak akademisi disetiap program yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Sama halnya dengan temuan Hendra Irawan bahwa kerjasama pemerintah yang kolaboratif dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Kepulauan Sula belum mencapai potensi maksimal karena kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan lain, seperti akademisi (Umabaihi et al., 2022). Begitu pula dengan temuan sindi puspita bahwa *collaborative governance* yang dilakukan di Kabupaten Bojonegoro belum terlihat sepenuhnya oleh beberapa pemangku kepentingan seperti akademisi dan pihak swasta (Puspita et al., 2024).

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa *collaborative governance* dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangka Raya belum berjalan dengan baik dan maksimal karena belum adanya pertemuan yang dilakukan. Pertemuan baru dilakukan ketika munculnya titik api atau walikota Palangka Raya telah menetapkan status pada kebakaran hutan dan lahan. Kolaborasi yang dilakukan baru terdapat pada tiga pemangku kepentingan yaitu pemerintah, swasta dan komunitas masyarakat. Untuk akademisi dan media massa belum terlihat kesempatan untuk melakukan kolaborasi sehingga kolaborasi pentahelix belum dapat terlaksana.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian sehingga peneliti hanya memberikan satu atau dua informan pada setiap unsur *pentahelix* yang mudah di jangkau penulis agar dapat melaksanakan penelitian ini.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa dengan waktu yang lebih lama dan informan yang ditambahkan berkaitan dengan kolaborasi dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangka Raya untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian. serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- BNPB. (2022). *Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022*.
https://inarisk.bnpb.go.id/pdf/BUKU_IRBI_2022.pdf
- Direktorat PKHL. (2023). *Karhutla Monitoring Sistem*. Sipongi. <https://sipongi.menlhk.go.id/>
- Finaka, A. W. (2018). *Waspada Potensi Kebakaran Hutan Saat Kemarau Panjang*. Indonesiabai.Id. <https://indonesiabaik.id/infografis/waspada-potensi-kebakaran-hutan-saat-kemarau-panjang>
- Javier, F. (2023, September 5). *Ada 6000 Lebih Titik Panas Karhutla di Seluruh Indonesia*. Tempo.Co. <https://data.tempo.co/data/17s63/ada-6000-lebih-titik-panas-karhutla-di-seluruh-indonesia>
- Lumbanbatu, M. D., Kurnianingsih, F., & Okparizan. (2021). Collaborative Governance Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Tahun 2020. *Student Online Journal*, 2(2), 1284–1296.
<http://repositori.umrah.ac.id/2268/>

- Maylani, T., & Mashur, D. (2019). Collaborative Governance Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 105–110.
<https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/download/7870/6781>
- Puspita, S., Junadi, & Wulandari, S. (2024). Collaborative Governance Dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Bojonegoro. *JIAN-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 16–26. <https://doi.org/10.56071/jian.v8i1.829>
- Rafdi, H., Wasistiono, S., & Meltarini. (2023). Collaborative Governance Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 3884–3898. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11630>
- Safira, B., Rahman, A., & Alqarni, W. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 8(1), 1–14. <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/23198/11169>
- Safitri, S. (2015). El Nino, La Nina dan Dampaknya Terhadap Kehidupan di Indonesia. *Jurnal Criksetra*, 4(8), 153–156.
<https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/criksetra/article/viewFile/4786/2536>
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. PT Grasindo. <https://osf.io/preprints/osf/mfzuj>
- Susetyo, P. D. (2023, June 30). *Krisis Iklim Mengancam Indonesia, Apa yang Harus Dilakukan?* Kompas.Com.
<https://www.kompas.com/sains/read/2023/06/30/153431723/krisis-iklim-mengancam-indonesia-apa-yang-harus-dilakukan?page=all>
- Umabaihi, H. I., Nurdin, N., & Romli, A. (2022). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 1349–1358.
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/download/9936/7647>
- Wibowo, A. (2023, September 27). *Tim gabungan padamkan karhutla di sejumlah titik di Palangka Raya*. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/3747105/tim-gabungan-padamkan-karhutla-di-sejumlah-titik-di-palangka-raya>